

Mengkritik Ahok, Menghidupkan Demokrasi

Teuku Kemal Fasya

Fenomena ini adalah sebuah ironi : 11 April 2016 adalah hari kemenangan bagi Teman Ahok karena berhasil mengumpulkan 532 ribu KTP sebagai syarat mencalonkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai gubernur melalui jalur perseorangan pada Pilkada 2017. Namun di sisi lain, di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara ada ratusan warga kawasan Pasar Ikan Kampung Luar Batang menangis melihat rumah-rumah mereka dirobokkan oleh alat berat dan dihadang 4 ribu aparat keamanan.

(<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/11/09082431/Warga.Pasar.Ikan.Berurair.Air.Mata.Sambil.Berdoa>). Ironi ini semakin pekat karena Ahok salah satu ikon perubahan demokrasi lokal di Indonesia.

Warga memang tidak melakukan perlawanan keras seperti di Kampung Pulo tahun lalu. Sebagian mereka terlihat pasrah dengan opsi satu-satunya yaitu relokasi ke beberapa Rusun yang jauh dari tempat mereka tinggal sebelumnya. Relokasi pun tidak sederhana, karena mereka terburai ke pelbagai rumah susun (Rusun) seperti Rusun Rawa Bebek, Marunda, Muara Kapuk, dll. Mereka yang dulunya berkerabat kini terpisah-pisah akibat proyek perencanaan spasial yang belum tentu tidak komersial. Pupus sudah ingatan masa kecil bersama.

Warga tidak berontak karena sudah melihat kaleidoskop pengurusan di era Ahok. Tidak ada yang berhasil mempertahankan diri dari upaya pengurusan, sekeras atau sebanyak apapun tenaga dan air mata. Sebulan sebelum pengurusan kawasan Pasar Ikan, Jakarta Utara, kawasan Kalijodo berhasil rata dengan cepat. Saat itu ada justifikasi yang sifatnya moralistik, yaitu memberantas pelacuran dan bisnis haram. Gusuran pun mulus, karena tokoh antagonis (Daeng Azis) berhasil ditangkap polisi sebelumnya.

Model Teknokratis

Pola pengurusan selama ini kerap memakai pendekatan struktural dan legalistik, sedangkan pendekatan kultural dan humanistik diabaikan. Jarang dihitung kerugian akibat model pengurusan (eufemisme : relokasi) seperti kerugian sosio-kultural masyarakat.

Jika memakai perspektif tujuh unsur kebudayaan Prof. Koentjaraningrat, warga Kampung Luar Batang telah dirampas paling tidak dua, yaitu sistem kemasyarakatan dan sistem ekonomi dan mata pencaharian.

Sebelumnya masyarakat nelayan Pasar Ikan Kampung Luar Batang memiliki ruang habituasi cukup diakrabi, kini teralienasi secara struktural dan gradual akibat politik relokasi. Belum lagi kultur “rumah kotak” tersusun vertikal yang tidak pernah dipahami oleh warga gusuran, kini menjadi takdir ke depan mereka.

Rumah susun atau apartemen adalah konstruksi kultural masyarakat urban yang tidak hidup dalam sistem mata pencaharian bersifat komunalistik. Model apartemen atau rumah susun dipilih oleh warga urban yang terbiasa berbudaya liberal-individualistik. Atau, model rumah susun terpaksa dipilih keluarga yang telah putus asa bertahan hidup di kota besar, tak ada cara lain kecuali tinggal di rumah kotak dan memproyeksikan diri sebagai *homo economicus*. Dapat dipahami kalau banyak warga tidak bahagia setelah mendapat kompensasi rumah susun, meskipun sebelumnya rumah mereka kumuh, reyot, dan semi permanen.

Model pendekatan pembangunan Ahok yang sangat teknokratis tidak tepat menghadapi warga miskin, pinggir, dan beragam adat-budaya seperti di Jakarta. Di beberapa sudutnya, Jakarta masih seperti “kota desa” yang jauh dari citra sinetron di televisi swasta.

Pendekatan model ini di era Orde Baru disebut developmentalisme. Atas nama kemajuan dan pembangunan, kemanusiaan dan demokrasi bisa dipinggirkan. Anehnya, Ahok menjadi pemimpin dari rahim demokrasi elektoral yang seharusnya makin sensitif atas kepentingan konstituen yang unik dan beragam. Ia harus bisa menyelami sisi *imponderabilia* – memakai istilah pakar etnografi asal Polandia, Bronislaw Malinowski – yaitu jiwa sosial masyarakat beserta perangkat kulturalnya.

Pendekatan teknokratis ala Ahok kerap menghitung indeks kemajuan pembangunan dari sudut ekonomis dan bisnis. Layaknya perusahaan, ketika timbangan nilai lebih (*surplus value*) tidak tercapai, dengan cepat ia melakukan pendekatan konsekuensi yaitu mutasi dan demosi. Kita cukup sering mendengar kalimat, “saya akan pecat jika tidak becus”, dari Ahok yang kadang dilakukan tidak dengan hati-hati. Pilihan bahasa menekankan kata ganti “saya” - sebagai personifikasi pemerintah Jakarta - dibandingkan “kami” – sebagai representasi pemerintah yang kompleks – menunjukkan sindrom Louis XIV, *L'état cest moi* (negara adalah Saya) pada diri Ahok.

Mengkritik Pemerintahan Ahok

Dalam konteks ini, kritikan atas Ahok adalah prasyarat demokrasi masih berjalan dan fungsi kewarganegaraan (*citizenship*) untuk berpartisipasi, berkomunikasi, dan melakukan tekanan-tekanan politik masih sehat.

Kritik atas Ahok, terutama harus dilakukan juga oleh para pendukungnya, untuk menghindari kekuasaan berakumulasi sedemikian dominannya, sehingga terbentuk pengetahuan aksiomatik Ahok tidak pernah keliru. Tanpa kritik yang objektif dan keras, wajah pemerintahan di Jakarta terus berjalan secara monolitik, yaitu sesuai selera Ahok. Adapun selera warga dan pemangku kepentingan lainnya terpinggirkan.

Kritik pun harus tetap muncul dari kelompok pro-demokrasi sebagai minoritas kreatif. Kritik harus bisa dibedakan dengan model komunikasi rasis ala Habib Rizieq, atau kritik distortif ala Yusril Ihza Mahendra yang terlihat sebagai permainan tabung pasir politik menjelang Pilkada Jakarta 2017 (<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/28/09433611/Sambil.Tepuk.Dada.Ahok.Sebut.Dia.yang.Percantik.Masjid.Luar.Batang>).

Kritik kita kepada Ahok adalah konstruktif bagi demokrasi. Kita tetap menginginkan representasi demokrasi berada pada *maqam*-nya, yaitu rakyat sebagai pemilik mandat dan kedaulatan tertinggi. Dan ingat, semurni-murni rakyat adalah yang miskin, lemah, terusir, dan tidak memiliki akses pada keadilan. Metode kritik diperlukan untuk menghindari demokrasi terluka akibat nirpartisipasi dan terlindas oleh kuasa modal (korporatokrasi) yang memanipulasi kepentingan rakyat demi nafsu libidinalnya yang khas.

Kita tetap mengapresiasi langkah-langkah Ahok mengubah Jakarta melalui pendekatan teknokratis agar semakin baik, maju, dan modern. Namun jangan lupa ingatkan dia untuk mengimbangnya dengan pendekatan sosial, kultural, ekologis, dan kemanusiaan agar Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi semua, lestari, seimbang, dan beradab. Jakarta tetap Jakarta, bukan Singapore, Dubai, atau Hongkong versi lain.

Prinsip pembangunan seharusnya tidak hanya berada pada satu kanal, tapi multi-saluran. Saya teringat kata-kata alm. Prof. Afan Gaffar, dosen ilmu politik UGM yang tepat diungkap dalam konteks pemerintahan Ahok. "*Kita perlu mendukung pemerintahan yang dipilih secara demokratis dengan kritik, bukan sekedar puja-puja yang menyebabkan ia menjadi dewa*".

Teuku Kemal Fasya, dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

www.kompas.com, 14 April 2016